

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Mandar memiliki sejarah panjang dengan struktur pemerintahan adat yang unik dan berlapis, sebagaimana tercermin dalam sistem federasi tujuh kerajaan pesisir yang dikenal sebagai *Pitu Ba'bana Binanga*. Sistem ini menjadi fondasi pemerintahan tradisional Mandar, di mana masing-masing kerajaan memiliki otonomi internal namun tetap saling terhubung melalui mekanisme adat yang memastikan stabilitas antar-kerajaan. Setiap kerajaan, seperti Balanipa, Pamboang, dan Lalampanoewa, menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan hukum adat dengan melibatkan dewan adat yang beranggotakan para pa'bicara serta kepala-kepala wilayah lainnya.

Namun, kedatangan pemerintah kolonial pada tahun 1905 membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan tradisional Mandar. Ekspedisi militer yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda merupakan upaya untuk menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda secara langsung. Hal itu dilakukan untuk memperkuat posisi mereka di Hindia Belanda dan meluncurkan aktivitas perekonomian seperti penarikan pajak.¹ Ekspedisi Militer yang dilancarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Mandar mendapatkan perlawanan dari masyarakat Mandar. Namun, pada tahun 1908 wilayah Mandar takluk sepenuhnya kepada Belanda. Hal ini ditandai dengan ditangkapnya I Calo Ammana I Wewang yang



Muhammad Amir, "*Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905-1akassar: Arus Timur, 2016*), hlm. 42.

kemudian diasingkan ke Belitung.² Ditangkapnya I Calo Ammana I Wewang oleh Tentara Belanda menjadi titik awal kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Mandar.

Perubahan akibat intervensi pemerintah kolonial meliputi pengurangan peran dewan adat serta pembatasan kekuasaan mara'dia. Sebagai contoh, para kepala komunitas yang sebelumnya memiliki hubungan langsung dengan dewan pusat, kini diturunkan posisinya menjadi kepala desa yang lebih terikat dengan kebijakan pemerintah kolonial. Struktur pemerintahan adat yang sebelumnya mengutamakan musyawarah dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan menjadi semakin terpusat di bawah kontrol kolonial.

Selain itu, hukum adat memainkan peranan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Mandar. Misalnya, hukum adat mengatur tata cara suksesi kepemimpinan, hubungan antara kepala komunitas dengan pemerintah pusat, hingga penyelesaian konflik antar-wilayah. Sistem ini mencerminkan keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, intervensi kolonial juga memengaruhi pengelolaan hukum adat, mengubah beberapa kewenangan lokal menjadi bagian dari struktur administratif kolonial.

Struktur adat Mandar terdiri dari tujuh kerajaan pesisir yang membentuk federasi bernama *Pitu Babana Binanga* atau "tujuh muara sungai", yakni Balanipa, Tjenrana, Banggai (Madjene), Pambaoeang, Mamoedjoe, Tapalang, dan



Abdul Karim, "Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907", *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 209.

Binoeang. Masing-masing kerajaan berfungsi secara otonom, namun ketika muncul perselisihan yang melibatkan lebih dari satu kerajaan, penyelesaian selalu dipimpin oleh Balanipa. Kerajaan Mandar memiliki dewan tradisional, seperti pada Pambaoeang yang diperintah oleh *Paladjarang Talloe*, sebuah dewan beranggotakan 12 orang ditambah seorang pangeran. Subdivisi administratif seperti *lita* dipimpin oleh *pabitjara*, sementara kepala komunitas lokal disebut *papocangang*, *poeatta*, atau gelar serupa. Posisi pemimpin sering kali bersifat turun-temurun, dan peran perempuan dalam pemerintahan adat cukup signifikan, termasuk kemungkinan menjadi pemimpin kerajaan. Kerajaan Balanipa yang terbilang sebagai pemimpin dari kerajaan-kerajaan di Mandar merupakan target utama dalam setiap usaha penaklukan wilayah yang dilakukan oleh Belanda.³

Pemerintahan sub-kolonial merujuk pada bentuk pengaturan administratif yang diterapkan di wilayah tertentu di bawah pengaruh kolonial, tetapi masih mempertahankan unsur-unsur kemandirian lokal. Contoh dari bentuk ini dapat ditemukan dalam tata kelola kerajaan Majene, di mana kerajaan ini dibagi menjadi enam sub-bagian yang disebut banuwa. Masing-masing banuwa memiliki tingkat otonomi yang signifikan, dan hukum adat menyatakan bahwa penguasa pusat, seperti maradia atau anggota hadat, tidak boleh mencampuri urusan internal banuwa kecuali diminta secara khusus oleh masyarakat setempat.

Dalam struktur pemerintahan tersebut, masyarakat banuwa dibagi menjadi



Abdul Karim, Rekonstruksi Mandar: Otoritas Hindia Belanda Dan Afdeling Mandar 1905-1942, *Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare* n. 23.

tiga golongan: puang (bangsawan), maradika (merdeka), dan ata atau boedak (hamba). Golongan puang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan lokal, termasuk memilih pemimpin adat yang dikenal sebagai indona ana kajang. Pemilihan ini berlangsung secara independen, tanpa memerlukan ratifikasi dari penguasa pusat. Sistem ini menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial mempertahankan kekuasaan secara tidak langsung, dengan mengandalkan struktur tradisional untuk menjaga ketertiban dan mengurangi intervensi langsung.

Pada penelitian ini penulis akan menggambarkan lebih mendalam dampak kolonialisme terhadap struktur pemerintahan adat Mandar, keberlanjutan sistem federasi tujuh kerajaan, serta bagaimana hukum adat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan wawasan historis tetapi juga relevansi kontemporer terkait nilai-nilai otonomi lokal dan pelestarian warisan budaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan di atas, penulis kemudian menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa dampak dari kedatangan pemerintah kolonial pada tahun 1905 terhadap struktur pemerintahan adat Mandar, termasuk perubahan fungsi dewan negara dan pengurangan kekuasaan tradisional?
2. Bagaimana struktur pemerintahan tradisional Mandar setelah ditaklukkan pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1908?
Bagaimana peran hukum adat dalam mengatur tata kehidupan masyarakat



Mandar, khususnya dalam kaitannya dengan suksesi kepemimpinan dan pengelolaan konflik?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini terdiri atas dua, yaitu batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial pada penelitian ini adalah Wilayah Mandar, yang terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi yang menjadi pusat dari masuknya Pemerintahan Kolonial pada tahun 1905.

Sementara batasan temporal penelitian ini dimulai pada tahun 1905 hingga pada tahun 1942.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak dari kedatangan pemerintah kolonial pada tahun 1905 terhadap struktur pemerintahan adat Mandar, termasuk perubahan fungsi dewan negara dan pengurangan kekuasaan tradisional.
2. Untuk mengetahui struktur pemerintahan tradisional Mandar setelah ditaklukkan pemerintahan Hindia-Belanda pada tahun 1908
3. Untuk mengetahui peran hukum adat dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Mandar, khususnya dalam kaitannya dengan suksesi kepemimpinan dan pengelolaan konflik.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sebagai salah satu sumber referensi tentang Pemerintahan Adat di Mandar Pada Masa Kolonial 1905-1942.

2. Memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca, khususnya tentang Pemerintahan Adat di Mandar Pada Masa Kolonial 1905-1942.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah langkah yang dilakukan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema penelitian ini. Tinjauan pustaka sebagai sumber referensi dalam menyusun penelitian ini dan tinjauan pustaka juga berisi landasan konseptual yang mengemukakan berbagai konsep dan teori yang dapat menunjang penyusunan penelitian.

1.6.1 Penelitian yang relevan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa sumber yang relevan, baik buku maupun jurnal, sebagai rujukan awal untuk memahami dinamika pemerintahan adat Mandar di masa kolonial. Di antaranya adalah karya Muhammad Amir berjudul *“Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905–1942”* yang menjelaskan secara umum tentang restrukturisasi wilayah dan sistem pemerintahan Mandar dari sudut pandang politik administratif kolonial. Namun, buku ini lebih menitikberatkan pada kebijakan-kebijakan formal yang diberlakukan oleh Belanda, sementara aspek peran dan transformasi nilai-nilai adat tidak dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengkritisi pendekatan tersebut dengan menambahkan pembacaan terhadap dinamika internal masyarakat adat, khususnya bagaimana struktur hadat dan nilai-nilai seperti *siri*’ dan *sibaliparri* tetap bertahan di tengah tekanan kolonial.



Selanjutnya, buku “*Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*” karya Edward L. Poelinggomang digunakan untuk memberikan konteks sejarah umum wilayah Mandar. Buku ini cukup informatif dalam menggambarkan proses awal kolonisasi, termasuk penandatanganan *korte verklaring*. Namun, kajian ini cenderung bersifat deskriptif dan tidak fokus secara mendalam pada sistem pemerintahan adat. Oleh karena itu, skripsi ini memberikan pendekatan yang lebih mikro dan fokus, dengan menelusuri struktur kekuasaan adat hingga ke tingkat komunitas seperti peran *pa’bicara*, *tobara*, dan *panetteq adaq*. Di sinilah letak kontribusi orisinal skripsi ini, yaitu mengangkat lapisan bawah struktur adat yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kajian makrohistoris. Jurnal ilmiah yang menyajikan pembahasan dengan tema sejarah Mandar pada masa kolonial di antaranya adalah karya Abdul Karim dengan judul “Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905-1907”. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai proses penaklukan Mandar melalui Ekspedisi Militer Belanda dan juga perlawanan masyarakat Mandar.

Adapun jurnal “*Ekspedisi Militer Belanda di Mandar 1905–1907*” yang ditulis oleh Abdul Karim menyoroti aspek militer dan penaklukan awal oleh Belanda serta perlawanan rakyat Mandar. Jurnal ini sangat berguna dalam memberikan konteks kronologis dan latar militer dari masuknya kekuasaan kolonial. Namun, jurnal ini tidak secara eksplisit mengulas bagaimana pemerintahan adat berevolusi pasca-ekspedisi. Dalam skripsi ini, penulis

akan pembahasan tersebut dengan mengkaji lebih jauh dampak lanjutan aksi terhadap lembaga adat, termasuk strategi adaptasi dan resistensi



masyarakat terhadap struktur baru yang diciptakan oleh kolonialisme.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada dokumen kolonial berupa *Memorie van Overgave* yang ditulis oleh Asisten Residen Mandar W.J. Leyds. Dokumen ini merupakan catatan resmi yang dibuat oleh pejabat kolonial saat akan mengakhiri masa tugasnya, berisi gambaran umum mengenai kondisi sosial-politik dan administratif wilayah Mandar. *Memorie van Overgave* Leyds memberikan informasi penting tentang bagaimana pemerintah kolonial menjalankan politik *indirect rule* dengan melibatkan struktur adat secara terbatas dan terkontrol. Dalam dokumen tersebut, terlihat bahwa pejabat Belanda memanfaatkan keberadaan maradika dan struktur hadat untuk menjalankan administrasi kolonial, tetapi membatasi kewenangan yudikatif dan legislatif mereka. Dokumen ini menjadi salah satu dasar konseptual penting dalam memahami proses integrasi sistem pemerintahan adat Mandar ke dalam struktur kolonial, sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai-nilai adat tetap bertahan di tengah upaya kolonialisasi.

1.6.2 Landasan Konseptual

Pemerintahan adat merupakan bentuk tata kelola masyarakat yang bersumber dari nilai-nilai lokal, norma tradisional, dan struktur kekuasaan yang berkembang secara historis di suatu komunitas etnis atau wilayah. Pemerintahan adat tidak hanya mencakup institusi politik seperti raja atau kepala adat, tetapi juga lembaga musyawarah, aturan tidak tertulis, serta sistem sosial yang menjamin dan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks Mandar, pemerintahan merujuk pada sistem kekuasaan tradisional yang dijalankan oleh para



maradika, *hadat*, dan pejabat-pejabat adat lainnya dalam kerangka federasi kerajaan-kerajaan seperti *Pitu Ba'bana Binanga*.

Secara konseptual, pemerintahan adat Mandar dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu struktur kekuasaan hierarkis (*maradika* dan *hadat*), norma-norma sosial dan hukum adat (*adaq*), serta nilai-nilai kolektif seperti *siri'*, *sibaliparri*, dan *assitonda-tonda*. Ketiganya membentuk sistem pemerintahan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan kultural. Pemerintahan adat bertujuan tidak hanya untuk mengatur kekuasaan, tetapi juga menjaga harmoni sosial, menjamin keadilan adat, dan mempertahankan identitas komunitas. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur pemerintahan adat—seperti yang terjadi akibat kolonialisme Belanda—tidak hanya berdampak pada sistem kekuasaan, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan nilai budaya masyarakat secara keseluruhan.

Konsep pemerintahan adat dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana struktur kekuasaan tradisional Mandar mengalami transformasi di bawah pemerintahan kolonial, serta bagaimana sistem nilai dan struktur sosial masyarakat bertahan atau beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian, indikator yang digunakan meliputi bentuk dan hierarki kekuasaan adat, mekanisme pengangkatan dan fungsi pejabat adat, peran lembaga musyawarah seperti *hadat*; dan ketahanan nilai-nilai lokal dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial.



alui kerangka ini, penelitian tidak hanya menilai perubahan formal yang tetapi juga memperhatikan kesinambungan tradisi dan bentuk adaptasi

masyarakat lokal dalam menghadapi intervensi kekuasaan eksternal. Pemerintahan adat dipahami bukan sebagai sistem yang statis, tetapi sebagai institusi dinamis yang merespons perubahan sejarah dengan cara mempertahankan inti nilai-nilainya sembari menyesuaikan bentuknya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulis yaitu metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah memiliki lima tahap penelitian, yakni pemilihan topik, pencarian sumber melalui studi literatur dan wawancara, kritik sumber, interpretasi dan penulisan sejarah.⁴ Dalam memilih topik, sebaiknya berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual penulis.⁵ Sebelum menentukan topik, penulis melakukan riset awal terhadap sejumlah topik yang menarik perhatian. Ini melibatkan membaca buku, artikel, dan berbagai sumber sejarah lainnya guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai wilayah dan periode dalam sejarah. Penulis juga mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber yang relevan untuk topik yang dipilih, termasuk memikirkan apakah terdapat cukup bahan sumber yang dapat mendukung penyelidikan lebih lanjut.

1.7.1 Pengumpulan Sumber

Akhirnya, sangat signifikan bagi penulis untuk memilih topik yang benar-benar sesuai minat. Keterlibatan emosional terhadap topik ini dapat berperan



Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, m. 69.
bid. hlm. 70.

dalam mempertahankan motivasi dan semangat penulis selama melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini, topik yang diambil oleh penulis adalah sejarah kota. Pengumpulan sumber, tahapan ini merupakan pengumpulan sumber yang dianggap relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pada tahapan ini penulis mengumpulkan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber-sumber pendukung yang relevan dengan penelitian ini menghimpun informasi dan peristiwa sejarah dari berbagai sumber tulisan, termasuk buku-buku yang tersedia di Perpustakaan FIB Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, juga dari toko buku dan sumber lainnya. Sumber sumber ini bertujuan untuk memperkuat atau membandingkan data dari sumber sumber utama yang telah diperoleh sebelumnya.

1.7.2 Kritik Sumber

Selanjutnya verifikasi (kritik sumber), Setelah melakukan pengumpulan sumber tahap berikutnya yaitu verifikasi atau kritik sumber yang terbagi menjadi dua yaitu, kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern mempertanyakan kebenaran materi atau mempertanyakan apakah sumber yang benar-benar dibutuhkan. Kritik intern mempertanyakan kebenaran isi atau relevansi sumber informasi yang dibutuhkan. Pada tahap ini, penulis memilih sumber yang tepat untuk membantu penulis dalam penelitiannya dan mengkritisi kembali data untuk mendapatkan fakta yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.3 Interpretasi



ahap ketiga interpretasi, yaitu Pada bagian ini penulis menganalisis fakta-
sumber-sumber sejarah yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan

mengenai inti dari fakta-fakta sejarah tersebut. Penulis mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang ada. Adapun pendekatan menganalisis masalah penelitian adalah sejarah kota karena ini berkaitan dengan perdagangan di wilayah tersebut.

1.7.4. Penulisan Sejarah

Tahap akhir dari proses penelitian sejarah adalah penulisan sejarah dimana semua data yang telah dikumpulkan dan diuji kebenarannya kemudian dirangkai dan dituangkan dalam tulisan sejarah. penyusunan tulisan, di mana data yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan ditafsirkan menjadi bahan utama. Pada tahap ini, fakta-fakta sejarah yang dipilih serta berbagai sumber akan diatur dalam bentuk narasi sejarah tertulis.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam proses penelitian sejarah, penting untuk mengikuti struktur penulisan yang teratur. Tujuannya adalah agar penyajian informasi lebih terstruktur. Penulis telah mengatur isi tulisan ini dalam lima bab, yang tertera sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pendekatan konseptual, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Gambaran Wilayah Mandar Pada Abad 19 hingga Abad 20.



Bab III mencakup pembahasan mengenai Struktur dan Sistem Pemerintahan Mandar.

Bab IV membahas mengenai Kebijakan Sistem Pemerintahan Adat Mandar Tahun 1905 hingga Tahun 1942.

Bab V merupakan simpulan berupa hasil yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya.



BAB II

GAMBARAN WILAYAH MANDAR ABAD 19-20

Wilayah Mandar yang berada di pesisir barat Pulau Sulawesi memiliki sejarah yang sangat kaya dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan aktivitas maritim dan sistem pemerintahan adat. Sebelum kedatangan kolonial Belanda pada awal abad ke-20, wilayah ini telah mengalami dinamika internal yang kompleks serta interaksi eksternal yang intensif, baik melalui jaringan dagang lokal maupun regional. Gambaran wilayah Mandar pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 tidak dapat dilepaskan dari posisi geografisnya yang strategis di tepi Selat Makassar serta peran penting kerajaan-kerajaan Mandar dalam jaringan perdagangan maritim Nusantara.¹

Topografi wilayah Mandar yang terdiri atas pantai, dataran rendah, sungai-sungai besar, dan perbukitan di pedalaman, turut membentuk struktur sosial dan pola kehidupan masyarakatnya. Kawasan pesisir menjadi pusat kehidupan ekonomi dan budaya, sementara daerah pedalaman menjadi penyangga dengan hasil-hasil pertanian dan hutan. Pola relasi antara pesisir dan pedalaman bukanlah hubungan satu arah, melainkan saling bergantung dan membentuk sistem ekonomi yang terpadu.²

¹ Edward L. Poelinggomang, *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*

r: Pustaka Refleksi, 2008), hlm. 110.

Adrian B. Lopian, *"Kajian Sejarah Lokal dalam Perspektif Sejarah Maritim"*,
; 2009, hlm. 3.



Kondisi ini turut melahirkan struktur pemerintahan yang mengakomodasi keragaman geografis dan sosial tersebut. Kerajaan-kerajaan adat Mandar, terutama yang tergabung dalam federasi Pitu Ba'bana Binanga, membentuk sistem kolektif yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan musyawarah antarwilayah. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi ancaman eksternal seperti serangan bajak laut ataupun konflik dagang antarpelabuhan.³



Gambar 2. 1 Peta Mandar Abad 19-20

Muhammad Amir, Penataan Mandar Masa Kolonial Belanda 1905–1942 r: Arus Timur, 2016), hlm. 45.



(Sumber: sultansinindonesieblog.wordpress.com, diakses pada 14 Juli 2025)

Sebagai wilayah dengan tradisi maritim yang kuat, aktivitas pelayaran dan perdagangan tidak hanya mendominasi kegiatan ekonomi, tetapi juga membentuk jati diri budaya masyarakat Mandar. Pelaut Mandar dikenal sebagai penjelajah ulung yang menjalin hubungan dagang dengan berbagai kawasan di Nusantara, seperti Kalimantan, Jawa, dan Maluku.⁴

Di sisi lain, tradisi adat dan nilai-nilai lokal seperti sibaliparri (kerja sama dalam menghadapi kesulitan) dan assitonda-tonda (kebersamaan dalam tindakan) mengakar kuat dalam struktur sosial Mandar. Nilai-nilai ini memperkuat jaringan kekerabatan dan solidaritas antarwarga, yang menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan sosial maupun ancaman eksternal.⁵

Bab ini akan membahas secara rinci struktur geografis, sosial, dan budaya wilayah Mandar pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Penekanan diberikan pada bagaimana bentuk wilayah, karakter masyarakat, dan kehidupan maritim membentuk struktur pemerintahan dan interaksi sosial. Pemahaman atas konteks ini menjadi penting untuk melihat bagaimana perubahan akibat kolonialisme pada 1905 berdampak pada sistem adat yang telah lama berkembang.⁶

2.1 Letak Geografis dan Struktur Sosial Wilayah Mandar



⁴ Darmawan Mas'ud Rahman, "Semangat Bahari di Mandar", 1987.
Gene Ammarell, Navigasi Bugis (Makassar: Hasanuddin University Press, m. 73.
C. Nooteboom, 'Vaartuigen van Mandar', Tijdschrift voor Indische Taal-, Volkenkunde, 1941, hlm. 30.

Wilayah Mandar secara geografis terletak di bagian barat Pulau Sulawesi dan memiliki garis pantai yang membentang panjang dari Pasangkayu di utara hingga Campalagian di selatan. Dalam konteks budaya dan sosial, wilayah ini dihuni oleh masyarakat etnis Mandar yang memiliki karakteristik budaya maritim yang kuat. Selat Makassar yang berada di sebelah barat menjadi penghubung utama antara Mandar dengan Kalimantan, Jawa, dan bahkan kawasan Asia Tenggara lainnya.⁷

Letak geografis yang strategis ini menjadikan wilayah Mandar sebagai titik penting dalam perdagangan laut. Pelabuhan-pelabuhan seperti Majene, Pambauwang, dan Tinambung menjadi simpul penting dalam arus barang dan manusia pada abad ke-19 dan ke-20. Di balik pelabuhan-pelabuhan itu, terbentang kawasan pedalaman yang menopang ekonomi pesisir dengan hasil bumi seperti padi, kelapa, dan rotan.

Secara administratif dan sosial, wilayah Mandar dibagi ke dalam sejumlah kerajaan adat yang tergabung dalam federasi Pitu Ba'bana Binanga. Masing-masing kerajaan ini memiliki struktur pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang mara'dia dan didukung oleh dewan adat. Federasi ini tidak hanya mengatur urusan pemerintahan, tetapi juga mengatur hubungan antar-kerajaan dan sistem pertahanan kolektif.⁸

Kehidupan masyarakat Mandar sangat erat kaitannya dengan struktur adat dan nilai-nilai kolektif seperti sibaliparri (membagi kesusahan) dan assitonda- tonda



Abd. Rahman Hamid, “*Jaringan Maritim Mandar*”. Makassar: Lembaga UNM, 2021, hlm.78
'bid, hlm. 91.

(gotong royong). Sistem sosial ini mencerminkan pola relasi yang simetris antara suami dan istri, antara pemimpin dan rakyat, serta antara komunitas pesisir dan pedalaman.

Selain itu, sistem ekonomi Mandar pra-kolonial juga sangat bergantung pada aktivitas maritim. Jenis-jenis perahu seperti padewakang, palari, dan sandeq digunakan tidak hanya untuk pelayaran lokal, tetapi juga untuk perdagangan antarpulau hingga ke Kalimantan, Maluku, dan Jawa. Setiap komunitas pesisir memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan perahu, navigasi laut, hingga sistem distribusi barang dagangan yang berbasis pada model bagi hasil yang adil.

Interaksi antar-wilayah berlangsung intens melalui pelayaran dan perdagangan, menjadikan Mandar bukan sebagai entitas tertutup, tetapi sebagai bagian dari jejaring ekonomi yang lebih luas di kawasan Asia Tenggara. Hal ini diperkuat oleh pelabuhan-pelabuhan pengumpan (feeder ports) yang menjadi tempat transit komoditas seperti kopra, rotan, kapok, beras, dan kain tenun.

Sebagai contoh, pelabuhan Pambauwang di Distrik Sendana dikenal sebagai pelabuhan utama pada musim timur (Mei–September). Keberadaan pelabuhan ini didukung oleh pasar yang ramai serta gudang penyimpanan milik bangsawan lokal. Sistem distribusi barang melibatkan petani, pelaut, dan pedagang dalam suatu mekanisme ekonomi yang tidak semata berbasis uang, tetapi juga barter.⁹



vitasi Ekonomi dan Budaya Bahari Mandar

bid, hlm. 198.

Kebudayaan maritim masyarakat Mandar pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan fondasi utama dari dinamika sosial dan ekonomi yang ada. Identitas sebagai masyarakat pelaut (paséban) tidak hanya tampak dalam aktivitas fisik pelayaran, tetapi juga dalam simbolisme, sistem nilai, dan struktur sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2. 2 Pesisir Pantai Majene Tahun 1911

(Sumber : Koleksi Museum Tropen Belanda

(<https://collectie.wereldculture>)



hu tidak sekadar alat transportasi, tetapi menjadi simbol keberanian, jawab, dan kerja sama. Misalnya, dalam sistem pelayaran tradisional,

nakhoda atau juragan tidak hanya mengendalikan arah perahu, tetapi juga menjadi penanggung jawab ekonomi kolektif atas barang-barang yang diangkut. Sistem pembagian keuntungan disusun secara adil, di mana perahu sebagai 'entitas' juga mendapatkan bagiannya. Ini menunjukkan bahwa perahu diposisikan tidak semata sebagai alat, melainkan sebagai aktor simbolik dalam jaringan produksi dan distribusi.

Model pelayaran Mandar banyak dipengaruhi oleh pengetahuan pelaut dari daerah lain. Adaptasi terhadap teknologi perahu lambo dari Buton dan leletele dari Madura memperlihatkan keterbukaan masyarakat Mandar terhadap pengaruh luar yang relevan secara fungsional. Namun demikian, mereka tetap mempertahankan identitas lokal dalam bentuk perahu sandeq yang dikenal cepat, ringan, dan efisien untuk pelayaran antarpulau.

Berdasarkan catatan pelayaran Hindia Belanda, pelabuhan-pelabuhan di Mandar tidak hanya melayani perdagangan lokal tetapi juga menjadi bagian dari sistem pelayaran nasional. Kapal-kapal Mandar seringkali berlabuh di pelabuhan besar seperti Makassar dan Surabaya, membawa barang dagangan dari Mandar dan kembali dengan barang kebutuhan rumah tangga, tekstil, dan peralatan.¹⁰

Nilai-nilai kolektif seperti sibaliparri juga tercermin dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Saat para lelaki berlayar selama berbulan-bulan, perempuan Mandar mengelola pengolahan hasil panen seperti padi dan kelapa,



Ibid, hlm. 201.

menenun kain, dan menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga. Mereka juga menjaga kehormatan keluarga dengan menjalankan pemali (pantangan) yang diyakini dapat memengaruhi keselamatan suami di laut.

Pengelolaan hasil pertanian dan kerajinan rumah tangga tidak hanya untuk konsumsi lokal tetapi juga untuk diperdagangkan. Aktivitas barter masih umum dilakukan, terutama antara penduduk pesisir dan pedalaman. Hasil bumi dari pedalaman seperti beras, jagung, dan rotan dipertukarkan dengan garam, kain, dan peralatan rumah tangga yang dibawa dari luar daerah.

Pada masa ini juga, hubungan perdagangan antara Mandar dan wilayah Kalimantan Timur (Kutai dan Pegatan) sangat intens. Hal ini tidak hanya terkait dengan sejarah migrasi awal orang Mandar yang diduga berasal dari Kalimantan, tetapi juga dalam konteks hubungan dagang beras dan hasil hutan. Pelabuhan-pelabuhan kecil di Kutai menjadi destinasi utama bagi perahu-perahu Mandar, dan sebaliknya, hasil-hasil hutan Kalimantan dikirim ke pelabuhan-pelabuhan di Mandar untuk diperdagangkan.

Peran pelabuhan sebagai simpul penting dalam jaringan ekonomi ini diperkuat dengan adanya infrastruktur yang relatif memadai pada masa itu, seperti gudang penyimpanan dan pasar yang terintegrasi dengan sistem administrasi kerajaan. Raja dan dewan adat memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas perdagangan, termasuk

penyelesaian sengketa dagang dan perlindungan terhadap pedagang asing.¹¹

Ibid, hlm. 213.



Menurut Christian Pelras, orientasi maritim masyarakat Sulawesi Barat, termasuk Mandar, memiliki kedalaman historis yang panjang. Budaya pelayaran Mandar terbentuk dari interaksi jangka panjang dengan kawasan sekitarnya dan melahirkan semacam 'identitas laut' yang kuat, yang membedakan mereka dari komunitas-komunitas pesisir lainnya di Nusantara.¹²



Christian Pelras, "*Manusia Bugis*" (Jakarta: Nalar, 2006), hlm. 46–47.